

ABSTRAK

ANGGIE ARTHA GAYO/ NIM 2210622074. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA PEMERINTAH ASING. Dibimbing oleh IMAM HARYANTO sebagai Pembimbing I dan DIANI SADIAWATI sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019 (PP Hibah) yang menjadi tantangan dalam proses pemberian hibah. Penelitian bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait hibah, politik luar negeri dan perjanjian internasional. Untuk pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menghadirkan perspektif yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas urgensi hibah Indonesia sebelum adanya PP Hibah, dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perjanjian hibah yang diatur dalam PP Hibah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hibah dengan sifat perjanjian yang diatur dalam PP Hibah. Berdasarkan tujuan hibah, hibah memiliki karakteristik tindakan publik, sementara perjanjian hibah memiliki karakteristik perdata. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tujuan hibah yang lebih memiliki dampak luas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan PP Hibah dengan mengubah substansi sifat perjanjian hibah menjadi hubungan publik dengan menggunakan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah sesuai ketentuan yang berlaku di hukum internasional.

Kata kunci: Diplomasi; Sengketa; Hibah,

ABSTRACT

ANGGIE ARTHA GAYO/ NIM 2210622074. ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT IN THE GRANT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FOREIGN GOVERNMENT. Supervised by IMAM HARYANTO as a First Advisor dan DIANI SADIAWATI as a Second Advisor.

This research examines the provisions of the choice of law clause and choice of forum in Indonesian grant agreements to foreign governments based on Government Regulation 48 of 2018 as amended by PP Number 57 of 2019 (PP Grants), which become the grant implementation burden. This normative research uses statutory and conceptual approaches. The statutory approach is carried out by analyzing grant regulations, foreign policy and international agreements. The conceptual approach is carried out by examining the legal views and doctrines put forward by experts. This research is novel because it presents a perspective that has yet to be discussed by previous research. Most previous research only discussed the urgency of Indonesian grants before the PP Grants came into existence, and no previous research specifically examined grant agreements regulated in the PP Grants. The research results concluded that there needed to be a better match between the objectives of the grant and the nature of the agreement regulated in the Grant PP. Based on the purpose of the grant, a grant has the characteristics of a public act, while a grant agreement has civil characteristics. For this reason, in order to realize the goal of grants that have a broader impact, adjustments are needed to the provisions of the PP on Grants by changing the substance of the nature of grant agreements into public relations by using choice of law and choice of forum clauses in grant agreements by applicable provisions in international law.

Keywords: *Diplomacy; Dispute; Grant*